1. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi salah satu kewajiban dalam pemeriksaan perkara kaum rentan? Jawaban: Memberikan layanan yang sensitive dan adil
2. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang dimaksud dengan layanan prioritas dalam memutus perkara kaum rentan? Jawaban: Menyesuaikan layanan dengan kondisi khusus kaum rentan
3. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi kewajiban tenaga teknis dalam memberikan layanan kepada kaum rentan? Jawaban: Bersikap profesional dan tidak diskriminatif
4. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi asas dalam mengadili perkara kaum rentan dalam perkara jinayat? Jawaban: Memperhatikan asas keadilan dan perlindungan bagi kaum rentan
5. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi tujuan asas mengadili perkara kaum rentan? Jawaban: Menegakkan keadilan dan perlindungan khusus bagi kaum rentan
6. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi salah satu aspek penting dalam pemeriksaan perkara jinayat terhadap kaum rentan? Jawaban: Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan
7. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Dalam perkara perdata, kaum rentan dapat berperan sebagai? Jawaban: Semua jawaban benar
8. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi pedoman dalam mengadili perkara kaum rentan dalam perkara perdata? Jawaban: Memperhatikan aspek dasar dan tujuan perlindungan hukum
9. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi tujuan evaluasi dalam bimbingan teknis ini? Jawaban: Menilai penguasaan materi dan analisa akademis peserta
10. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi salah satu upaya strategis dalam Pembangunan hukum terkait kaum rentan? Jawaban: Meningkatkan sensivitas pelayanan terhadap kaum rentan
11. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi dasar konstitusional akses keadilan bagi kaum rentan? Jawaban: Semua jawaban benar
12. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa tujuan utama penyelenggaraan bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum? Jawaban: Membentuk tenaga teknis peradilan yang professional dan berintegritas
13. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Dalam perkara jinayat, siapa saja yang termasuk kaum rentan? Jawaban: Semua jawaban benar
14. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa peran mahkamah agung dalam akses keadilan bagi kaum rentan? Jawaban: Mengeluarkan kebijakan penjaminan hak akses keadilan
15. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang dimaksud dengan “akses keadilan” bagi kaum rentan? Jawaban: Kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan hukum yang adil
16. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Siapa yang termasuk dalam kategori kaum rentan menurut silabus ini? Jawaban: Orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas
17. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi salah satu regulasi terkait pelayanan bagi kaum rentan? Jawaban: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
18. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan hukum bagi kaum rentan? Jawaban: Bias implisit dalam praktik peradilan
19. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Anak yang menjadi pihak dalam perkara disebut juga sebagai? Jawaban: Anak berhadapan dengan hukum
20. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Permintaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas diajukan ke? Jawaban: Ketua Pengadilan
21. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Pelayanan kepada disabilitas harus menjunjung nilai? Jawaban: Kesetaraan dan martabat
22. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui? Jawaban: UU No. 19 Tahun 2011
23. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Undang-undang mana menjadi dasar pelaksanaan bimbingan Teknis kaum Rentan? Jawaban: Semua jawaban benar
24. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Informasi putusan bagi penyandang disabilitas sensorik harus disampaikan? Jawaban: Dalam bentuk yang mudah diakses (audio/braile)
25. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Pelayanan prioritas dalam antrean diberikan kepada? Jawaban: Pihak dengan anak kecil
26. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Petugas meja informasi wajib bersikap? Jawaban: Ramah dan informatif
27. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Jangka waktu pengajuan permintaan layanan disabilitas sebaiknya? Jawaban: Minimal 3 hari sebelum sidang
28. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Etika pelayanan terhadap penyandangan disabilitas mengedepankan? Jawaban: Empati dan penghargaan
29. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Prinsip akomodasi yang wajar berarti? Jawaban: Menyediakan kebutuhan spesipik tanpa beban
30. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Peraturan teknis Mahkamah Agung tentang akomodasi yang wajar disebut dengan? Jawaban: SEMA
31. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Kursi roda merupakan bentuk akomodasi bagi disabilitas? Jawaban: Fisik
32. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Jika seorang penyandang disabilitas tidak dilayani secara wajar, maka? Jawaban: Pelanggaran Pidana
33. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Salah satu asas pelayanan terhadap kaum rentan adalah? Jawaban: Aksesibilitas
34. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Prinsip “akomodasi yang wajar” berarti? Jawaban: Menyediakan kebutuhan spesipik tanpa beban berlebihan
35. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Permintaan akomodasi dapat dilakukan oleh? Jawaban: Semua benar
36. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Tujuan utama Perma No. 3 2017 adalah? Jawaban: Menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan
37. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] CRPD adalah singkatan dari? Jawaban: Convention on the Right of Persons with Disabilities
38. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Perempuan korban kekerasan rumah tangga masuk kategori? Jawaban: Kelompok rentan
39. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Pelayanan prioritas dalam antrean diberikan kepada? Jawaban: Pihak dengan anak kecil
40. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Petugas layanan di Pengadilan wajib mendapatkan pelatihan tentang? Jawaban: Disabilitas dan kelompok rentan
41. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Yang termasuk kelompok rentan menurut Perma No. 3 Tahun 2017 adalah, kecuali? Jawaban: Aparatur sipil negara
42. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Kapan pengadilan wajib menunjuk pendamping bagi penyandang disabilitas? Jawaban: Jika disabilitas menyebabkan hambatan serius dalam komunikasi
43. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apakah yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam penghukuman membayar kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian? Jawaban: Hakim mempertimbangkan penghukuman kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian secara layak dan patut
44. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Konvensi tentang hak-hak penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) tahun 2006 adalah berkaitan dengan? Jawaban: Jaminan bagi penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain untuk menikmati kebebasan, rasa hormat, kesetaraan, dan martabat
45. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang perlu dilakukan oleh pengadilan untuk menjamin desiminasi informasi pengadilan juga diterima dengan baik oleh penyandang disabilitas? Jawaban: Memberikan layanan informasi publik sesuai dengan standar layanan informasi publik dengan memperhatikan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braile
46. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi, kecuali? Jawaban: Sidang audio visual jarak jauh
47. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa sengketa harta bersama jika rumah adalah tempat tinggal satu-satunya bagi anak penggugat dengan tergugat? Jawaban: Menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama, tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah)
48. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang dimaksud dengan kelompok rentan? Jawaban: Individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menikmati kehidupan yang layak, dan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya atau kesempatan yang sama dengan kelompok lain
49. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Berikut ini merupakan asas peradilan yang berkaitan dengan pelayanan bagi kelompok rentan? Jawaban: Semua jawaban benar
50. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Terdapat sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak bagi kelompok rentan yakni? Jawaban: Semua jawaban benar
51. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women / CEDAW) adalah berkaitan dengan? Jawaban: Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dan anak perempuan di semua bidang serta mempromosikan hak yang sama bagi Perempuan dan anak
52. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Berikut ini termasuk kelompok rentan kecuali? Jawaban: Para pihak dalam perkara perceraian
53. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) tahun 1989 adalah berkaitan dengan? Jawaban: Jaminan hak-hak anak dalam berbagai bidang seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya
54. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Berikut sejumlah kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan kelompok rentan, kecuali? Jawaban: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
55. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi, kecuali? Jawaban: Sidang Audio visual jarak jauh
56. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Terdapat dua rancangan kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan layanan bagi kelompok rentan, yakni? Jawaban: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Rancangan Perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas serta Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Publik
57. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Apa yang dapat dilakukan oleh Hakim ketika memeriksa perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mengalami trauma? Jawaban: Melakukan persidangan secara audio visual jarak jauh
58. [Soal Bimtek Kaum Rentan.docx] Prinsip pelayanan publik bagi kelompok rentan adalah, kecuali? Jawaban: Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh para pihak yang termasuk kelompok rentan
59. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Arah Kebijakan IE dalam UU 59/2024 mencakup penguatan lingkungan pendukung bagi individu dilakukan melalui? Jawaban: Penanaman nilai positif dan perubahan perilaku masyarakat
60. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Prinsip “Equitable Use” dalam desain universal pelayanan publik berarti? Jawaban: Penggunaan yang adil untuk semua kelompok
61. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Reformasi hukum yang dirancang dalam RPJMN memiliki tujuan utama yaitu? Jawaban: Mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan transparan
62. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Salah satu upaya strategis pemerintah dalam memenuhi HAM kaum rentan adalah menyediakan fasilitas ramah disabilitas yang artinya? Jawaban: Tersedia sarana yang sesuai dengan kebutuhan fisik kelompok disabilitas
63. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam? Jawaban: UU No. 19 Tahun 2011
64. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Salah satu indikator dalam peningkatan kualitas perlindungan anak adalah proporsi anak usia 13–17 tahun yang mengalami kekerasan dan? Jawaban: Memperoleh layanan komprehensif dari pemerintah
65. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan perlunya pelayanan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu. Kelompok ini mencakup? Jawaban: Lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat
66. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Pembangunan hukum yang inklusif dalam RPJMN 2025–2029 mencakup penguatan budaya hukum yang berarti? Jawaban: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat
67. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Salah satu hambatan utama dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan adalah adanya birokrasi yang rumit. Hal ini berdampak pada? Jawaban: Sulitnya kelompok rentan mendapatkan akses layanan yang layak
68. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam indeks perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, salah satu aspek yang diukur adalah? Jawaban: Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan
69. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam RPJMN 2025–2045 prinsip ‘no one left behind” bertujuan untuk? Jawaban: Menjamin inklusivitas dalam pembangunan nasional
70. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam kerangka RPJMN, indikator responsif gender mencakup persentase daerah yang? Jawaban: Melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender
71. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Salah satu indikator keberhasilan inklusi pendidikan dalam RPJMN adalah? Jawaban: Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif
72. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam strategi pembangunan hukum, penguatan lembaga kejaksaan termasuk salah satu prioritas. Hal ini bertujuan untuk? Jawaban: Meningkatkan jumlah dan profesionalisme jaksa dalam penegakan hukum
73. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Peran pemerintah dalam peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak yang artinya? Jawaban: Memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok rentan
74. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Pemerintah berupaya menyediakan bantuan hukum gratis bagi kelompok rentan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah? Jawaban: Menjamin akses keadilan yang setara bagi semua warga
75. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi, fokus utama diarahkan untuk? Jawaban: Mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan
76. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Indeks perlindungan khusus anak bertujuan untuk mengukur? Jawaban: Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi
77. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Pemerintah menargetkan tercapainya Indonesia Emas 2045 melalui prinsip inklusivitas, yang secara garis besar berarti? Jawaban: Tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan
78. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan sering kali bersumber dari? Jawaban: Ketidaktahuan masyarakat dan stereotip negatif yang berkembang
79. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam upaya penghapusan diskriminasi, pemerintah juga mengarusutamakan HAM dalam berbagai kebijakan. Ini berarti? Jawaban: Kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan perlindungan hak semua warga
80. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam konteks perlindungan anak dan perempuan, salah satu indikator penting dalam RPJMN 2025–2029 adalah? Jawaban: Proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun
81. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Salah satu hambatan utama pelayanan bagi kelompok rentan adalah minimnya informasi, yang mengakibatkan? Jawaban: Ketidaktahuan dalam menyelesaikan masalah hukum
82. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Pasal 10 dalam UU Pelayanan Publik menekankan pentingnya pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Aspek yang diatur meliputi kebijakan dan kepemimpinan serta? Jawaban: Aksesibilitas fisik, informasi, dan sumber daya manusia
83. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam rangka penguatan partisipasi kelompok rentan, pemerintah mendorong pelibatan langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Contoh konkret dari hal ini adalah? Jawaban: Melibatkan anak-anak dalam proses musyawarah pembangunan desa
84. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Pemerintah menyusun Indeks Pembangunan Hukum (IPH) untuk menilai? Jawaban: Kinerja sistem hukum nasional secara menyeluruh
85. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Kebijakan responsif gender tidak hanya menekankan pada kesetaraan, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik, oleh karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa? Jawaban: Setiap kebijakan memperhitungkan dampaknya terhadap perempuan dan kelompok rentan
86. [Soal Bimtek Kebijakan Pemerintah.docx] Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 202, salah satu tujuan utamanya adalah? Jawaban: Menyediakan pelayanan publik ramah terhadap kelompok rentan
87. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Adanya diskriminasi dalam layanan dan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan agama merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi: Jawaban: Kaum Rentan
88. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Termasuk kaum rentan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah: Jawaban: Semua benar
89. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Dampak dari bias implisit pada kaum rentan adalah: Jawaban: Kaum rentan tidak merasakan keadilan
90. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Berikut adalah regulasi Mahkamah Agung perihal layanan pada kaum rentan, kecuali: Jawaban: PERMA No. 5 Tahun 2019
91. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Hak berperkara secara cuma-cuma (prodeo) merupakan hak kaum rentan yang berhubungan dengan: Jawaban: Fakir Miskin
92. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Berikut ini kaum rentan sebagai subyek hukum di lingkungan peradilan agama kecuali: Jawaban: Aparatur Negara
93. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Pengelolaan berbagai aspek administrasi yang terkait dengan pengadilan, termasuk manajemen kasus, pengelolaan dokumen, administrasi keuangan, dan sistem informasi merupakan pengertian dari: Jawaban: Administrasi Peradilan
94. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Berikut adalah hak kaum rentan berhadapan dengan hukum pada layanan administrasi, kecuali: Jawaban: Hak mengajukan/mendaftarkan perkara
95. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Berikut adalah hak kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan, kecuali: Jawaban: Hak mendapatkan informasi
96. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Terhadap akses keadilan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa penyebab terhambatnya kecuali: Jawaban: Kecukupan ekonomi
97. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Administrasi peradilan merupakan bagian integral dari: Jawaban: Kekuasaan kehakiman
98. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, dan integritas aparatur peradilan terutama hakim, merupakan hambatan kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam hal: Jawaban: Faktor internal pengadilan
99. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Sikap atau stereotip yang tidak disadari yang mempengaruhi pemahaman dan keputusan kita merupakan definisi dari: Jawaban: Bias Implisit
100. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Berikut adalah permasalahan yang dihadapi kaum rentan berhadapan dengan hukum di lingkungan peradilan agama, kecuali: Jawaban: Pelayanan yang maksimal
101. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Subyek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala kehidupan bermasyarakat, sebagai organ ciptaan manusia yang berdasar hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti individu (manusia). Kalimat tersebut merupakan pengertian dari: Jawaban: Badan Hukum
102. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Subyek hukum dalam arti biologis, sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, kehendak. Kalimat dimaksud merupakan pengertian dari: Jawaban: Individu
103. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Kelompok dalam masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi sebagai sasaran kekerasan, praktik diskriminasi, bencana alam, atau kesulitan ekonomi lain adalah pengertian dari: Jawaban: Kaum rentan
104. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Hak mengajukan alat-alat bukti merupakan salah satu hak kaum rentan berhadapan dengan hukum yang berhubungan dengan: Jawaban: Proses persidangan
105. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Apabila informasi ditolak, kaum rentan di lingkungan peradilan agama berhak mengajukan: Jawaban: Keberatan
106. [Soal Free test Hambatan Kaum Rentan.docx] Apabila tidak puas dengan putusan pengadilan, kaum rentan yang bersidang berhak untuk: Jawaban: Mengajukan Upaya Hukum
107. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Dalam perkara perceraian hakim wajib untuk, kecuali: Jawaban: Hakim memandang bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai tindakan kriminal serius
108. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Tujuan menghormati harkat dan martabat manusia oleh hakim adalah: Jawaban: Untuk menghindari penghinaan atau perlakuan tidak manusiawi
109. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Siapa yang termasuk kelompok rentan pada perkara pemeliharaan anak, kecuali: Jawaban: Anak di bawah umur 198 tahun
110. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Hak apa saja yang harus dijamin bagi kaum rentan di persidangan? Jawaban: Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
111. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Dasar hukum perlindungan kaum rentan di Indonesia mencakup, kecuali: Jawaban: UU No. 23 Tahun 2002
112. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Akibat kurangnya perlindungan bagi kaum rentan dalam perkara perdata adalah: Jawaban: Penyimpangan hukum dan ketimpangan keadilan
113. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Dalam pembagian harta bersama, hakim harus mempertimbangkan: Jawaban: Kepentingan terbaik untuk anak
114. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Mengapa perlu ada perlakuan khusus terhadap kaum rentan dalam perkara perdata? Jawaban: Karena tanpa perlakuan khusus kaum rentan sulit mendapatkan keadilan
115. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Tantangan relasi kuasa dalam perkara kaum rentan sering kali menyebabkan ketidaksetaraan di pengadilan. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan dampak relasi kuasa ini? Jawaban: Relasi kuasa bersifat hierarkis dan menimbulkan dominasi satu pihak atas lainnya sehingga berpotensi merugikan posisi tawar kelompok rentan dalam persidangan
116. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Apa definisi kelompok rentan menurut Komisi Nasional HAM Indonesia? Jawaban: Kelompok dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dan rawan diskriminasi
117. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Salah satu tantangan utama perlindungan kaum rentan adalah: Jawaban: Budaya patriarki dan relasi kuasa yang diskriminatif
118. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Sikap hakim yang melanggar prinsip non diskriminasi contohnya adalah: Jawaban: Anggapan bahwa Perempuan lebih sering berbohong
119. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Apa yang dimaksud dengan kelompok rentan dalam konteks hukum perdata? Jawaban: Kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi sosial, fisik atau psikologis
120. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Tujuan menghormati harkat dan martabat manusia oleh hakim adalah: Jawaban: Untuk menghindari penghinaan atas perlakuan tidak manusiawi
121. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Budaya patriarki menyebabkan: Jawaban: Diskriminasi terhadap Perempuan dalam pengambilan keputusan
122. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Perlindungan terhadap anak dalam perkara perdata harus memprioritaskan: Jawaban: Kepentingan terbaik anak
123. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Perlindungan terhadap wanita hamil di persidangan meliputi: Jawaban: Perlakuan menghindari stres dan tekanan
124. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Dalam perkara perceraian yang melibatkan anak-anak, apakah kepentingan orang tua selalu menjadi prioritas utama? Jawaban: Tidak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama hakim
125. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Tujuan bantuan hukum bagi kaum rentan adalah, kecuali: Jawaban: Mengurangi beban kerja hakim
126. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Hakim wajib menghindari: Jawaban: Sikap subyektif berdasar prasangka gender
127. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Prinsip non diskriminasi dalam persidangan berarti: Jawaban: Perlakuan setara tanpa memandang gender, usia, atau cacat
128. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Siapa saja yang termasuk kelompok rentan dalam perkara perdata: Jawaban: Anak-anak, Perempuan, penyandang cacat, dan fakir miskin
129. [Soal Pedoman Mengadili Perkara Perdata.docx] Larangan gaya bersidang bagi hakim adalah: Jawaban: Menggunakan Bahasa menghina atau mengejek
130. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Siapa saja yang termasuk dalam kategori kaum rentan menurut Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM? Jawaban: Anak-anak, lansia, fakir miskin, wanita hamil, penyandang disabilitas
131. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Prinsip utama komunikasi terhadap kaum rentan dalam sistem peradilan adalah: Jawaban: Menciptakan rasa aman, empati, dan pemahaman yang setara
132. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Berikut ini merupakan contoh komunikasi yang tidak ramah terhadap korban kekerasan: Jawaban: “Kenapa tidak lapor dari dulu kalau memang disiksa?”
133. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Yang termasuk prinsip dari Trauma-Informed Care adalah, kecuali: Jawaban: Menyudutkan untuk menggali informasi
134. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi yang baik terhadap anak sebagai pihak dalam perkara harus mempertimbangkan: Jawaban: Visualisasi dan metafora sederhana
135. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Reaksi seperti menangis, bingung, atau diam saat pemeriksaan bisa menunjukkan bahwa klien sedang mengalami: Jawaban: Trauma atau tekanan psikologis
136. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Tujuan dari asesmen psikososial awal terhadap pihak rentan adalah: Jawaban: Menentukan kebutuhan pendampingan atau penyesuaian layanan
137. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Teknik komunikasi ramah lansia meliputi hal berikut, kecuali: Jawaban: Menggunakan dokumen kecil dan padat
138. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Contoh penerapan unconditional positive regard dalam komunikasi terhadap kaum rentan adalah: Jawaban: Menghormati dan menerima kondisi individu tanpa menghakimi
139. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Tantangan komunikasi terhadap korban kekerasan rumah tangga yang paling sering muncul adalah: Jawaban: Menarik diri dan sulit bercerita
140. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Ketika seorang anak menangis saat dipanggil ke ruang sidang, respons komunikasi yang paling tepat adalah: Jawaban: “Silakan tenang dulu, kami tidak akan memaksa.”
141. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi audio visual jarak jauh (AVJJ) digunakan dalam proses hukum terutama untuk: Jawaban: Melindungi pihak rentan agar tetap bisa berpartisipasi dengan aman
142. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam komunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual, teknik yang tepat adalah: Jawaban: Berikan penjelasan satu langkah demi langkah dengan visualisasi
143. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi empatik ditunjukkan dengan kalimat: Jawaban: “Saya tahu ini sulit, Ibu tidak sendiri di sini.”
144. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, prinsip komunikasi terhadap kaum rentan adalah: Jawaban: Adil, setara, dan tanpa intimidasi
145. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi AVJJ mempunyai keuntungan di bawah ini, kecuali: Jawaban: Mempermudah akses keadilan bagi kelompok rentan
146. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999, berikut ini termasuk kelompok rentan, kecuali: Jawaban: Pejabat Politik
147. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Berikut adalah alasan mengapa penyandang disabilitas membutuhkan keberadaan ahli terkait dalam proses peradilan, kecuali: Jawaban: Membantu penyandang disabilitas mendapatkan advokasi selama dalam proses persidangan
148. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Kasus Fatimah, perempuan tuli tanpa juru bahasa isyarat profesional di sidang: tindakan paling tepat aparat pengadilan adalah: Jawaban: Menunda sidang dan memastikan kehadiran juru bahasa isyarat profesional yang bersertifikat
149. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Berikut termasuk kelompok rentan, kecuali: Jawaban: Depresi
150. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Perma No. 3 Tahun 2017 mengatur tentang: Jawaban: Perempuan berhadapan dengan Hukum
151. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi inklusif menurut UNESCO adalah pendekatan yang: Jawaban: Menghargai keragaman dan mencegah diskriminasi
152. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Seorang administrasi peradilan melayani penyandang disabilitas pendengaran yang butuh informasi jadwal sidang. Teknik komunikasi efektif adalah: Jawaban: Menuliskan informasi penting di kertas atau menggunakan papan tulis
153. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Validasi emosi dalam konteks komunikasi bermakna: Jawaban: Mengakui dan memahami emosi orang lain tanpa menghakimi
154. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam melayani korban KDRT yang cemas dan trauma, petugas sebaiknya: Jawaban: Empati dan mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi
155. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam persidangan hakim wajib: Jawaban: Menyesuaikan bahasa dan memberi waktu cukup kepada kaum rentan
156. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Rekomendasi untuk mendampingi kaum rentan biasanya diberikan oleh: Jawaban: LBH, LSM, Psikolog
157. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam konteks hambatan substantif penyandang disabilitas di Pengadilan Agama, pendekatan paling komprehensif adalah: Jawaban: Menyediakan informasi aksesibel, bantuan hukum ramah disabilitas, serta kerja sama dengan organisasi disabilitas
158. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Tuna ganda merupakan kondisi mengalami 2 gangguan atau lebih, kecuali: Jawaban: ADHD dengan IQ 110
159. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] UUD 1945 pasal yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum adalah: Jawaban: Pasal 28 D
160. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] UU yang melindungi hak penyandang disabilitas di Indonesia adalah: Jawaban: UU No. 8 Tahun 2016
161. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Tujuan debriefing setelah simulasi komunikasi dengan klien rentan adalah: Jawaban: Merefleksikan kekuatan dan area perbaikan
162. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Pernyataan yang kurang tepat tentang pentingnya pendampingan bagi kelompok rentan adalah: Jawaban: Pemberdayaan pendampingan juga bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan agar lebih mandiri di masa depan
163. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Seorang remaja perempuan menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual. Komunikasi hakim harus mengedepankan: Jawaban: Keselamatan psikologis dan pemberdayaan suara korban
164. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Apa yang bisa terjadi jika pengadilan mengabaikan kebutuhan pendamping bagi korban? Jawaban: Proses hukum bisa merugikan korban
165. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Mengapa sensitivitas dan empati penting dalam komunikasi dengan kelompok rentan? Jawaban: Menghindari cedera emosional
166. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Prinsip utama komunikasi inklusif yang bukan termasuk adalah: Jawaban: Kekuasaan hukum
167. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Hak-hak kaum rentan di persidangan diatur dalam: Jawaban: UU Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung
168. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Berlangsung secara timbal balik, makna pesan ringkas dan jelas, bahasa mudah dimengerti adalah bentuk dari: Jawaban: Komunikasi efektif
169. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Definisi penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 meliputi keterbatasan, kecuali: Jawaban: Sosial ekonomi
170. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama, penggugat adalah penyandang disabilitas yang dituduh tidak cakap hukum oleh tergugat. Tindakan hakim yang mencerminkan prinsip akomodasi yang layak adalah: Jawaban: Memerintahkan penilaian personal untuk memahami kapasitas penggugat
171. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Berikut adalah kunci berkomunikasi dengan kaum rentan: Jawaban: Empati dan sensitivitas
172. [Soal Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi humanistik dalam pelayanan hukum harus mencerminkan: Jawaban: Nilai kasih sayang dan perlindungan terhadap yang lemah
173. [Soal Kuis – Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Prinsip utama dalam komunikasi trauma-informed adalah: Jawaban: Memberi kendali dan pilihan kepada pihak yang mengalami trauma
174. [Soal Kuis – Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Dalam menghadapi anak-anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, petugas sebaiknya: Jawaban: Menggunakan pendekatan naratif dan metafora sederhana
175. [Soal Kuis – Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Saat seorang lansia tampak bingung di meja pelayanan, petugas sebaiknya: Jawaban: Menjelaskan kembali dengan perlahan dan ramah
176. [Soal Kuis – Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Berikut ini adalah contoh pertanyaan menggiring yang sebaiknya dihindari dalam komunikasi terhadap korban perempuan: Jawaban: “Kenapa Ibu tidak melawan saat dipukul?”
177. [Soal Kuis – Pre test Komunikasi Kaum Rentan.docx] Komunikasi dengan penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan dengan prinsip berikut, kecuali: Jawaban: Menyampaikan informasi dengan bahasa teknis hukum